

## DI BLORA ANGGARAN PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN HANYA Rp50 JUTA PER TAHUN, BEGINI KATA DINAS



Sumber Gambar:

<https://infokini.news/wp-content/uploads/2023/07/images-52.jpeg>

### Isi Berita:

BLORA, RADARPATI.ID - Meningkatnya kasus kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Blora tiap tahunnya tidak didukung oleh anggaran perlindungan korban kekerasan.

Pasalnya, pagu anggaran yang dialokasikan untuk perlindungan perempuan dan anak hanya Rp 50 juta dalam satu tahun.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial (Dinsos) Blora Amidah Rahayu mengaku masih banyak kasus kekerasan anak dan perempuan di Blora.

Bahkan angkanya terus meningkat tiap tahunnya.

"Dari data yang dihimpun tiga tahun terakhir, kekerasan terhadap perempuan dan anak bertambah.

Apabila ditotal mencapai 68 kasus. Yakni, pada 2022 jumlah aduan sebanyak 17 kasus, bertambah banyak pada 2023 menjadi 23 aduan dan Oktober 2024 mencapai 28 aduan kasus kekerasan," ucapnya.

Ia mengaku, masyarakat saat ini mulai berani untuk melaporkan adanya kekerasan perempuan dan anak.

Namun, pihaknya mengaku anggaran yang diberikan pemerintah kabupaten untuk perlindungan anak dan perempuan masih terbatas.

"Anggaran perlindungan itu digunakan untuk biaya visum, biaya pendampingan psikolog dan psikiater.

Untuk biaya penanganan ini dalam satu kasus sering dilakukan lebih dari sekali. Biayanya juga berkisar Rp 300 ribu," ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Blora Luluk Kusuma Agung Ariadi mengaku anggaran yang dialokasikan pada program perlindungan anak dan perempuan itu masih terbatas.

Setiap tahunnya berbeda, sesuai dengan yang diajukan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Blora.

"Untuk anggaran perlindungan kekerasan seksual pada anak itu berasal dari APBD daerah. Dukungan anggaran pada 2022 sebesar Rp 47 juta.

Sedangkan pada 2023 dialokasikan sebanyak Rp 85 juta dan pada 2024 dianggarkan sebanyak Rp 25 juta," jelasnya.

Luluk mengaku, anggaran tersebut masih minim untuk memberikan perlindungan kekerasan seksual pada anak dan perempuan.

Namun, pihaknya juga dibantu oleh Kementerian Sosial dan Unicef dalam pengadaan barang dan bantuan untuk korban kekerasan.

"Untuk 2025 besok sudah coba kami ajukan dan usulkan pada tim TAPD.

Semoga saja ada penambahan, jika tidak ya kami akan berupaya untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan anggaran yang ada," tuturnya. (ari/ali/amr/cori)

### **Sumber Berita:**

1. <https://radarpati.jawapos.com/blora/2245278263/di-blora-anggaran-perlindungan-korban-kekerasan-hanya-rp-50-juta-per-tahun-begini-kata-dinas?page=2>, "Di Blora Anggaran Perlindungan Korban Kekerasan hanya Rp 50 Juta per Tahun, Begini Kata Dinas", tanggal 5 November 2024.
2. <https://www.panduga.id/2024/11/04/kekerasan-perempuan-dan-anak-di-blora-meningkat-anggaran-cuma-rp-50-juta-per-tahun/>, "Kekerasan Perempuan dan Anak di Blora Meningkat, Anggaran Cuma Rp 50 Juta per Tahun", tanggal 4 November 2024.

### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
  - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
  - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*